

## **PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 1 TUNTANG KABUPATEN SEMARANG**

**Abstrak :** Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan. Pemberdayaan Komite Sekolah dapat diwujudkan diantaranya melalui pelibatan mereka dalam penyusunan rencana dan program sekolah, RAPBS, pelaksanaan program pendidikan dan penyelenggaraan akuntabilitas pendidikan. Salah satu tugas dan fungsi komite adalah sebagai badan pertimbangan dan pendukung dalam hal penyusunan dan penetapan RAPBS serta memberi dukungan dalam financial khususnya dalam penggalan dana dari wali siswa atau masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan data menganalisa peranan komite sekolah dalam (1) Proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) di SMA Negeri I Tuntang, (2) Cara memperoleh dukungan dana dan pengalokasian biaya pendidikan di SMA Negeri I Tuntang, serta (3) Pengawasan dan evaluasi biaya pendidikan di SMA Negeri I Tuntang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan komite sekolah terutama dalam pembiayaan pendidikan di SMA Negeri I Tuntang Kabupaten Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), *controlling agency* (pengontrol kegiatan) dan mediator (penghubung) telah memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan sekolah tersebut. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai meliputi prasarana fisik dan non fisik. Kerja sama yang baik antara pihak sekolah dan komite terlihat dari kekompakan dalam penyusunan RAPBS sehingga semua program yang direncanakan mendapat dukungan dana dari pemerintah, wali murid dan pihak swasta.

**Kata Kunci:** *Peranan, Komite Sekolah, Biaya Pendidikan.*

Komitmen untuk menjadikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional memang sudah cukup jelas, sebagaimana digariskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 pasal 8 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Selanjutnya dalam pasal 9 disebutkan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 dalam Keputusan Mendiknas tersebut dinyatakan bahwa peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan: (1) *advisory agency* (pemberi pertimbangan),

(2) *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan) dan (4) *mediator*, penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Biaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan.

Bray (1996) mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber biaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan alokasi belanja untuk proses pengajaran, termasuk pengeluaran sekolah untuk gaji dan berbagai pelayanan di setiap jenis sekolah. Dengan kata lain, pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber dan alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan.

SMA Negeri I Tuntang adalah SMA Negeri termuda di Kabupaten Semarang, sejak mulai diresmikan pendiriannya sampai saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat baik dilihat dari bangunan fisiknya, pemenuhan sarana prasarana yang ada serta prestasi yang diperoleh. Perkembangan dan prestasi yang diraih ini ternyata tidak terlepas dari peranan komite sekolah. Komite sekolah SMA Negeri I Tuntang telah berhasil memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan yang telah diraih oleh sekolah tersebut. Salah satunya adalah peranannya dalam pembiayaan pendidikan. Kinerja yang baik dari komite telah menghantarkannya menjadi juara Aditama I Lomba Kinerja Komite Sekolah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten Semarang.

### **Kedudukan Masyarakat dalam Manajemen Sekolah**

Dalam konteks sekolah, masyarakat sekolah adalah warga atau individu yang berada di sekolah dan di sekitar sekolah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah, memiliki kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap sekolah. Masyarakat pendidikan adalah segenap komponen terkait yang memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap program pendidikan, sehingga lazim muncul pernyataan tentang *stake-holder* atau pihak yang berkepentingan yang berkenaan untuk melakukan tugas tersebut.

Kerangka pikir pemberdayaan masyarakat pendidikan di antaranya melibatkan masyarakat dalam menggali sumber dana pendidikan dan pengembangan sumber daya manusianya. Sebab hal ini berkaitan erat dengan prinsip yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat tanpa membedakan antara satu dengan lainnya. Perhatian masyarakat terhadap pendidikan terungkap melalui ide-ide atau bantuan yang diwujudkan melalui dana dan tenaga. Masyarakat akan menjadi tumpuan atas peningkatan dan pelayanan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, sehingga hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat akan memberi dampak yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan. Jika sarana dan fasilitas belajar yang disediakan oleh pemerintah dibantu oleh masyarakat terpenuhi sesuai kebutuhan untuk digunakan para peserta didik, dengan penyediaan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi dan penyediaan

fasilitas belajar yang demikian baik, maka peserta didik akan mampu menyerap model pengajaran yang disampaikan oleh para gurunya sebagai pendidik dan pengajar yang profesional.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Wadah Komite Sekolah**

Pengembangan sekolah yang berbasis pemberdayaan masyarakat sangatlah relevan dengan USPN. Manajemen sekolah konsepnya sudah lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat, baik dalam partisipasi formal yang diatur secara hukum maupun partisipasi informal yang bergerak atas dasar keinginan sendiri. Pemberdayaan (*empowerment*) dalam arti kemampuan melakukan sesuatu yang terbaik dalam ukuran sendiri. Masyarakat adalah input dari penggunaan *stakeholders* pendidikan yang akan menikmati langsung hasil dari pendidikan tersebut. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.014/U/2002 tanggal 2 April 2002 Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya pada tingkat satuan pendidikan dalam wadah ini berbentuk badan yang diberi nama "Komite Sekolah," atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Agar tidak tumpang tindih kewenangan dan bentuk partisipasi masing-masing, perlu dibuat aturan mengenai struktur organisasi dan kapan Komite Sekolah / Madrasah, Dewan Pendidikan dan masyarakat dapat mengambil sikap untuk melakukan tindakan dan kapan pula harus menjaga jarak Kontribusi komite sekolah terhadap sekolah.

### **Tugas dan Fungsi Komite Sekolah**

Sebagaimana dikemukakan Satori (2001 :71- 75) bahwa tugas dan fungsi Dewan Sekolah / Komite Sekolah antara lain: (1) menetapkan AD dan ART komite sekolah, memberi masukan terhadap muatan RAPBS dan Rencana Strategik Pengembangan serta Standar Pelayanan Sekolah; (2) menentukan dan membantu kesejahteraan personal, mengkaji pertanggung jawaban dan implementasinya; (3) mengkaji kinerja sekolah dan melakukan *internal auditing (school self assessment)*, merekomendasikan, menerima kepala sekolah dan guru. Tugas Dewan Sekolah membantu menetapkan visi, misi dan standar pelayanan, menjaga jaminan mutu sekolah (*quality assurance*), memelihara, mengembangkan potensi, menggali sumber dana, mengevaluasi, merenovasi, mengidentifikasi, dan mengelola kontribusi masyarakat terhadap sekolah.

Dapat ditegaskan bahwa tugas dan fungsi utama komite sekolah memberikan masukan, pertimbangan (*advisory agency*), dan rekomendasi pada satuan pendidikan dengan prinsip mendorong peningkatan mutu akademik dan mutu layanan belajar di mana komite sekolah itu berada. Tugas pokok dan fungsi komite sekolah memberi bantuan, baik berupa pemikiran bagaimana cara mengatasi berbagai problematika sekolah maupun finansial untuk mendukung manajemen dan kegiatan belajar mengajar yang dibutuhkan sekolah. Bantuan yang diberikan ini akan dapat memajukan sekolah dalam hal mutu yang bersaing.

### **Kewenangan Komite Sekolah**

Eksistensi masing-masing ditegaskan pada kewenangnya mengambil kebijakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Penegasan kewenangan,

tanggung jawab dan mekanisme kerja badan tersebut diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kekhususan setempat. Dengan demikian pola hubungan kerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menempatkan mereka untuk dapat melakukan negosiasi kepada pemerintah dan stakeholder lainnya misalnya dalam hal penetapan anggaran kebutuhan sekolah yang menjadi kewenangan eksekutif, badan ini dapat melakukan negosiasi kepada eksekutif agar kebijakan diarahkan benar-benar sesuai kebutuhan, selanjutnya badan ini melakukan negosiasi kepada pihak legislatif agar ketetapan legislatif juga sesuai dengan kebutuhan sekolah.

### **Konsep Manajemen Biaya Pendidikan**

Biaya pendidikan berfungsi melancarkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Ketersediaan biaya yang memadai sangat menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan dengan sedikit dana dapat berlangsung, tetapi pendidikan yang bermutu membutuhkan dana yang cukup besar. Apabila dukungan pendanaan pendidikan berkurang, maka mutu pendidikan juga akan berkurang.

Komponen pokok manajemen keuangan, menurut Rebores (1985; 116) terdiri atas: (1) prosedur penganggaran; (2) prosedur akuntansi keuangan; (3) pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian; (4) prosedur investasi; dan (5) prosedur pemeriksaan.

Hal yang terpenting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana agar dana dapat dimanfaatkan secara efisien, dialokasikan dengan tepat sesuai dengan skala prioritas dan dapat mendukung semua penyelenggaraan proses pendidikan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bermutu. Anggaran merupakan salah satu alat bantu manajemen, artinya bahwa anggaran adalah rencana atau penentuan terlebih dahulu seluruh kegiatan organisasi di waktu yang akan datang yang dinyatakan dalam unit moneter.

### **Penganggaran Biaya Pendidikan di Sekolah**

Dalam manajemen, perencanaan mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan langkah awal suatu kegiatan, yang antara lain: penciptaan, penyusunan program, perumusan proyek, mempelajari masa yang akan datang, dan penyusunan rencana kerja.

Penyusunan anggaran sangat penting dilakukan, karena sangat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan yang akan berdampak pada penghematan sumber daya yang biasanya terbuka, baik dalam dana maupun sarana dan prasarana sehingga berbagai bentuk pemborosan dan pembaziran dapat dihindari. Upaya ini memerlukan komitmen yang kuat terhadap kebijakan dan program yang lebih terarah pada sasaran dan kegiatan yang tinggi prioritasnya (*priority targeting*), yang diukur berdasarkan dampaknya langsung terhadap mutu dan pemerataan pendidikan

### **Sumber dan Alokasi Anggaran Sekolah**

Di dalam rencana anggaran harus memuat data atau informasi yang berkenaan dengan :

- (1) Informasi rencana kegiatan: sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggung jawab, rencana baru atau lanjutan; (2) uraian kegiatan

program: program kerja, rincian program; (3) Informasi kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan; (4) Data kebutuhan: harga satuan, jumlah biaya yang diperlukan untuk seluruh volume kebutuhan; (5) Jumlah anggaran; jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan periode terkait (6) Sumber dana: total sumber dana, masing-masing sumber dana yang mendukung pembiayaan program. (Dirjen Dikdasmen, 2002: 42)

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 menyebutkan bahwa Pengelolaan dana pendidikan dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). Adapun unsur-unsur utama pengelolaan keuangan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu: (1) unsur berkala dan unsur hukum (2) unsur luar dan dalam.

Untuk menggali sumber-sumber biaya pendidikan, menurut Zymelman (1975) dapat digunakan metode antara lain : pajak, pembayaran bea, sumbangan-sumbangan filantropis, hibah, disposisi kekayaan umum, pemanfaatan keuntungan perusahaan swasta, dan bea-cukai. Metode lain yang kemampuan menghasilkannya terbatas misalnya: penjualan saham, undian, sumbangan dana khusus, langganan, denda, bea perizinan, ganti rugi, dan sebagainya.

### **Evaluasi dan Pertanggungjawaban Anggaran Sekolah**

Tahap evaluasi anggaran dimaksudkan untuk melihat efektivitas anggaran dalam membiayai berbagai kegiatan dan aktiva yang ada. Evaluasi bukan dimaksudkan untuk menemukan gagasan baru atau mekanisme keuangan, tetapi untuk menganalisis hasil dan melakukan perbaikan gagasan pada periode berikutnya, terutama yang berkenaan dengan siswa, program pengajaran, dan personalia (Jones, 1985)

### **Peranan Komite Sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan**

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:(1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.(2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat (4) Memberikan masukan, per- timbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.(5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan (6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

## METODE

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif memiliki karakteristik natural, bersifat deskriptif, peneliti lebih memperhatikan proses daripada hasil atau produk, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih jelas.

Setting penelitian di SMA Negeri I Tuntang Kabupaten Semarang berlangsung di sekolah dengan harapan dapat memperoleh informasi dari kepala sekolah, staf pengajar, staf tata usaha, anggota komite sekolah dan sebagainya yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi tentang peranan Komite Sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SMA Negeri I Tuntang Kabupaten Semarang. Selain itu, setting penelitian juga berlangsung di lingkungan tempat sekolah berada terutama di tempat tinggal anggota komite sekolah dengan harapan dapat memperoleh informasi tentang bukti kongkrit peranan komite sekolah SMA Negeri I Tuntang Kabupaten Semarang dalam hal pembiayaan pendidikan.

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu data tentang peranan komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan. Jenis data dalam penelitian ini adalah : (1) data primer dan (2) data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subyek (informan) yang berkaitan dengan peran komite di SMA Negeri I Tuntang Kabupaten Semarang. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen dan foto-foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Karakteristik data sekunder berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar atau foto-foto. (Moleong 1994 : 42)

Menurut Sugiyono (2005:62), pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian, wawancara mendalam dilakukan untuk mengambil data tentang peranan komite dalam pendidikan melalui keterangan dari anggota komite dan kepala sekolah serta orang-orang yang terkait, dan dokumentasi hal ini digunakan untuk mencocokkan dengan data yang diperoleh dari wawancara.

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tentang kondisi selama di lapangan, baik berupa keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Menurut Spradly observasi meliputi tiga komponen yaitu ruang (tempat), pelaku (aktor), dan kegiatan (aktivitas). (Nasution, 1996:63)

Pengamatan dilakukan kepada kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah, ketua komite, dan pengurus selaku penyusun program bersama kepala sekolah, guru kelas sebagai anggota komite, guru kelas sebagai pelaksana program, anggota komite dari unsur wali murid, dan seluruh warga sekolah pada umumnya.

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kriteria untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode yang disarankan Moleong (2002), yaitu: (1) derajat kepercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) ketergantungan (*dependability*) dan (4) kepastian (*confirmability*).

Teknik triangulasi adalah cara yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber data yang berarti membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Proses analisis data ini peneliti lakukan secara terus-menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Di dalam melakukan analisa data peneliti mengacu tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2005:91) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan, atau biasa dikenal dengan model analisis interaktif. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap, maka peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan seterusnya sampai diperoleh data yang betul-betul mantap sehingga merupakan suatu siklus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peranan Komite Sekolah di SMA Negeri I Tuntang memang telah dimulai sejak didirikannya sekolah ini. Bertitik tolak dari visi dan misi serta tujuan yang diharapkan inilah komite dan sekolah mulai menyusun rencana anggaran baik RAPBS maupun rencana anggaran untuk pengembangan sekolah.

Kedudukannya sebagai mitra sekolah. dalam pembiayaan pendidikan peran komite terutama pada bagaimana komite memberi masukan pada penyusunan RAPBS. Komite sekolah SMA Negeri I Tuntang adalah pihak yang aktif dalam memberikan masukan-masukan atau ide dalam penyusunan RAPBS.

Kegiatan merencanakan sumber dana dan pengeluaran pendidikan dalam anggaran bukan persoalan yang mudah. Dimana sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah serta berapa besarnya harus sudah dapat dihitung sebelumnya. Sumber dana itu mungkin dari bantuan pemerintah pusat / daerah, dari orang tua siswa atau masyarakat, sedangkan komponen-komponen pengeluarannya harus disesuaikan dengan besarnya penerima.

Sumber dana terbesar yang diperoleh SMA Negeri I Tuntang sampai dengan saat ini adalah dari pemerintah pusat dan daerah. Komite bersama pihak sekolah saat ini telah mengupayakan sumber dana yang lain yaitu melalui kerjasama dengan PT. Indonesia Power dan PT. Perkebunan Tlogo, walaupun masih bersifat insidental.

Bantuan yang pernah diberikan oleh PT. Indonesia Power diantaranya pembangunan lapangan volley dan pembuatan jalan menuju ke sekolah. Sedangkan dari PT. Perkebunan Tlogo sampai saat ini memberikan bantuan beasiswa. Selain kedua perusahaan tersebut pihak komite juga beberapa kali mengajak pihak masyarakat sekitar untuk membantu pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan selain dukungan dana yang diperoleh dari masyarakat dan orangtua siswa, pihak komite juga selalu berusaha untuk memperoleh bantuan dana dari pemerintah. Langkah yang telah ditempuh oleh pihak komite untuk memperoleh dana dari pemerintah dengan membuat sertifikat tanah.

Proses pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban biaya pendidikan di SMA Negeri I Tuntang Kabupaten Semarang, secara administratif diarahkan kepada mekanisme pengelolaan dana secara terpadu. Keterpaduan

tersebut terlihat dari keterkaitan unit-unit kerja sekolah didalam proses-proses administratif secara teratur dan dalam siklus tertentu dengan maksud memperjelas tentang siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, bagaimana dan untuk apa hal itu dilakukan. Adapun instrumen pengawasannya terdiri atas pemeriksaan dan pelaporan.

Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan penggunaan biaya pendidikan. Kegiatan ini meliputi sub-sub pemeriksaan terhadap penganggaran, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penggunaan biaya.

Kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah membentuk Tim Penyusun RAPBS, yang ditugasi menyeleksi kegiatan apa saja yang harus dibiayai sesuai dengan kategori program pendidikan yang diselenggarakan atau ditingkatkan pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan seleksi dan identifikasi kebutuhan itu kemudian tim menyusun RAPBS.

Pemeriksaan atas pelaksanaan penggunaan biaya pendidikan, pada umumnya dilakukan oleh Komite Sekolah, Dinas Pendidikan dan aparat pemeriksaan anggaran Kabupaten. Sifat pemeriksaan cenderung ditujukan kepada ketepatan dan keterarahan antara sektor kegiatan yang dibiayai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Adapun waktu pemeriksaan terdiri atas dua jenis, yaitu pemeriksaan secara insidental dan pemeriksaan berkala setiap triwulan. Ruang lingkup pemeriksaan dapat bersifat menyeluruh, dapat pula terfokus hanya kepada satu dua sektor pembiayaan yang dianggap sangat urgen bagi pelaksanaan layanan pengajaran.

Pelaporan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara periodik. Arus pelaporan dimulai dari pelaksana belanja dan pelaksana kegiatan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah kemudian menyampaikan laporan itu kepada Dinas Pendidikan dan petugas pengelola keuangan daerah Kabupaten.

Komite sekolah SMA Negeri I Tuntang dalam penyusunan RAPBS selalu aktif memberikan masukan hal ini sesuai dengan peran komite sebagai badan pertimbangan (*Advisory agency*). Berdasarkan mekanisme penyusunan RAPBS di SMA Negeri I Tuntang seperti tampak pada gambar 4.2, Kepala sekolah bersama tim dan komite menyeleksi kegiatan apa saja yang harus dibiayai sesuai dengan kategori program pendidikan yang diselenggarakan atau ditingkatkan pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan seleksi dan identifikasi kebutuhan itu tim kemudian menyusun RAPBS

Sumber dominan biaya pendidikan di SMA Negeri I Tuntang Kabupaten Semarang berasal dari anggaran pemerintah. Sebagaimana sekolah-sekolah negeri pada umumnya, SMA Negeri I Tuntang Kabupaten Semarang mulai melakukan upaya kreatif untuk menggali dan menganekaragamkan sumber perolehan dana pendidikannya.

Hal yang selama ini ditempuh masih terbatas pada penghimpunan dana dari orang tua siswa melalui komite sekolah. Selain itu pihak komite dan sekolah juga berusaha menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat menjadi donatur untuk mendukung pembiayaan pendidikan seperti yang telah dilakukan dengan PT Indonesia Power dan PT Perkebunan Tlogo yang merupakan perusahaan yang potensial untuk diajak bekerjasama.



Prosedur dan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan mengacu pada ketentuan yang merupakan suatu syarat penting dalam pengendalian mutu keuangan. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik, penerimaan dan pengeluaran dapat menimbulkan kesalahan yang tidak segera diperbaiki. Keberhasilan lembaga dalam menyusun RAPBS tahun yang lalu maupun pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana akan diketahui melalui keserangkaan kegiatan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.

Mengenai evaluasi pendayagunaan biaya pendidikan di SMA Negeri I Tuntang Kabupaten Semarang secara administratif diarahkan kepada mekanisme pengelolaan dana secara terpadu. Keterpaduan tersebut terlihat dari keterkaitan unit-unit kerja lembaga pendidikan di dalam proses-proses administratif secara teratur dan dalam siklus tertentu dengan maksud memperjelas tentang siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, bagaimana dan untuk apa hal itu dilakukan. Adapun kegiatan pokok evaluasi terdiri atas pemeriksaan dan pelaporan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan dalam bab ke-empat, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Komite sekolah SMA Negeri I Tuntang telah menjalankan fungsinya sebagai badan pertimbangan (*Advisory Agency*) dalam penyusunan biaya pendidikan yang tertuang dalam RAPBS, sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tidak terkendala oleh dana karena anggaran telah ditetapkan secara cermat. Komite sekolah sebagai badan pertimbangan selalu mengupayakan penyusunan RAPBS secara efektif dan efisien sehingga tidak terjadi adanya dobel anggaran atau pemborosan biaya pendidikan.

Komite sekolah SMA Negeri I Tuntang telah mampu menjadi *Supporting Agency* sekaligus sebagai mediator dalam hal penggalangan dana dan alokasi biaya pendidikan, sehingga memperoleh kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat untuk mengelola biaya pendidikan. Beberapa strategi untuk memperoleh dana senantiasa diupayakan, misalnya dengan pembuatan sertifikat tanah, penggalangan dana pendamping dari orangtua siswa yang ternyata mampu menjadi nilai tambah dalam pengajuan proposal ke pemerintah. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan sekitar seperti PT. Indonesia Power dan PT. Perkebunan Tlogo yang telah memberikan beasiswa bagi siswa dan pembuatan lapangan olahraga serta pembangunan jalan menuju ke sekolah.

Komite sekolah SMA Negeri I Tuntang dalam hal pengawasan dan evaluasi biaya pendidikan telah dapat menjalankan fungsi controlling dengan baik, sehingga dapat memperbaiki manajemen biaya pendidikan di sekolah tersebut. Kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan komite dalam hal pengawasan dan evaluasi telah dapat memberikan informasi yang positif untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya.

### **Saran**

Sebagaimana ditemukan di lapangan, bahwa sumber dominan biaya pendidikan di SMA Negeri I Tuntang berasal dari anggaran pemerintah, oleh karena itu komite dan sekolah harus senantiasa profesional dan transparan dalam

pengelolaan biaya pendidikan sehingga dana bantuan dari pemerintah mudah untuk didapatkan.

Menjaga hubungan baik dan kerjasama antara sekolah, komite dan masyarakat (orangtua siswa dan pihak swasta), sehingga program-program yang telah direncanakan sekolah mendapat dukungan dana dari masyarakat dan pihak swasta. Serta masih perlu adanya sosialisasi pada masyarakat tentang peranannya dalam komite sekolah.

Komite sekolah perlu mencari terobosan-terobosan baru dalam hal penggalangan dana dari pihak swasta, sehingga peran swasta lebih ditingkatkan, misalnya melalui kerjasama dalam penjualan produk PT. Perkebunan Tlogo oleh para siswa, maka dari perusahaan dapat keuntungan dari penjualan produk dan dari pihak sekolah para siswanya memperoleh ilmu tentang pemasaran suatu produk.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi, 1988 *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Jakarta: Depdikbud.
- Bray, Marl. 1996. *Decentralization of Education: Community Financing*. Washington DC: World Bank.
- Depdikbud, Balitbang. 1996. *Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Pembangunan*. Jakarta: Depdikbud.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2003, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 050/42333 tentang Rencana Strategik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008.
- Engkoswara. 1987. *Dasar-dasar Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jalal, F. & Supriadi, D. (Ed.) (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Kerja sama Bappenas, Depdiknas, Adicita Karya Nusa.
- Jones, 1985. *School Finance: Technique and Social Policy*, London: Collier Macmillan Oub.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002: Sinar Grafika.
- Koontz, et. al (Alfonus Sirait, ed), 1996, *Manajemen*, Jakarta: Erlangga.
- Made Pidarta, (1988). *Perencanaan Pendidikan Pendekatan Partisipatori*. Jakarta: P2PLTK – Ditjen Dikti Depdikbud.
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morphet, 1975. *The Economic and Financing of Education*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Nasution. S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Sagala, Syaiful. 2007. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sanusi, Ahmad (1995), *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan*. Bandung: IKIP Bandung.
- Sarwono dan Halim (1989).

- Satmoko, Sr. 1999. *Landasan Kependidikan*. Semarang: CV IKIP Semarang Press.
- Satori, Dj. at al (2001). *Pedoman Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Jawa Barat*: MBS Dewan Sekolah. Bandung: Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk kalangan sendiri.
- Supriadi, Dedi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-undang RI, Nomor 20, 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Sinar Grafika